BAB II

TEORI MENGENAI DISPENSASI NIKAH

A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.³⁰

Allah swt. berfirman dalam Q.S *An-Nisā*/4: 1.

يَتَأْتِيَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً... ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah swt. menciptakan istrimu, dan dari keduanya Allah swt. memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....”³¹

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Q.S *An-Nūr*/24: 32.

³⁰ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

³¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 61.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴿١٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sehayamu yang laki-laki dan perempuan.”³²

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.³³

Adapun makna tentang makna pernikahan itu secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *Nikāh* (نِكَاحٌ) atau *Zauj* (زَوْجٌ)

³² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 282.

³³ Slamet Abidin dan Aminudin, *op. cit.*, hlm. 10.

- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkāh* (إِنكَاحٌ) atau *tazwīj* (تَزْوِيجٌ) untuk mendapatkan kepuasan, artinya laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.³⁴

2. Menurut Hukum Positif

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁵

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah “suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah swt. dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.”³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 10-11.

³⁵ Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I, (Alalak: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), hlm. 44.

³⁶ *Ibid.*

B. Tujuan Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dengan demikian pula halnya Hukum Islam mensyaratkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula.³⁷

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga, yang dari keluarga-keluarga itu terbentuk umat, yakni umat Islam. Sebagaimana hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S *An-Nahl*//16: 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ... ﴿٧٢﴾

“Allah swt. menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik”.³⁸

- b. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah swt.
- c. Menciptakan ketengan jiwa bagi suami istri dan rasa kasih sayang.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S *Ar-Rūm*/30: 21.

³⁷ Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 20.

³⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 219.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً... ﴿١١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”³⁹

d. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw.⁴⁰

Sebab di dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan adalah sambungan hidup dari orang tuanya. Bagi seorang Muslim, cita-cita yang paling tinggi baginya ialah untuk meninggikan agama Islam, mempunyai anak-anak dan keluarga yang shaleh.⁴¹

Dari keterangan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa dalam Hukum Islam juga mensyariatkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan taqwa kepada Allah swt..⁴²

2. Menurut Hukum Positif

Di dalam Hukum Positif, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 234.

⁴⁰ M. Thalib, *Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1987), hlm. 119-123.

⁴¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *op. cit.*, hlm. 125-126.

⁴² M. Thalib, *op. cit.*, hlm. 128.

ialah untuk membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tercantum pada Pasal 3 yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴⁴ Jadi, tujuan setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup.⁴⁵ Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah sama, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Menurut Fiqh

Rukun perkawinan ada lima, yaitu:

- a. Calon Mempelai laki-laki
- b. Calon Mempelai Perempuan
- c. Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua Orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki⁴⁷

⁴³ *Ibid.*, hlm. 125.

⁴⁴ *Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 2.

⁴⁵ Achmad Mubaraok, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa*, Cet. VIII, (Jakarta: Mubarak Institute, 2011), hlm. 141.

⁴⁶ M. Thalib, *op. cit.*, hlm. 125.

⁴⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 39.

2. Menurut Hukum Positif

Bagi negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.⁴⁸

Sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tentang sahnya perkawinan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”⁴⁹

Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang disebut dalam Pasal 4 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁵⁰

Adapun syarat Perkawinan:

1. Syarat-syarat mempelai
 - a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan mempelai.
 - b. Keduanya sama-sama beragama Islam

⁴⁸ *Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 101.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 78.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

- c. Antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan
- d. Kedua mempelai telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan setuju pula pihak yang mengawininya. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16
- e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.⁵¹

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Musḥim* hadits 1418 kitab ke-2, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْرُوتِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ، مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)).⁵²

“Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir R.A, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah sesuatu yang karenanya kehormatan menjadi halal bagimu.” (Muslim IV: 140).⁵³

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga, rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan

⁵¹ Abdul Kadir Syukur, *op. cit.*, hlm.47.

⁵² Imam Abi Husein Muslim bin al-Hajjaj al-Khusairy an-Naisabury, *Ṣaḥīḥ Musḥim*, Juz 2, Cet. II, (Lebanon: Dārul Kutūb al-Ilmiyah bairūt, 2008), hlm. 340.

⁵³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Ṣaḥīḥ Musḥim*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 509.

dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.⁵⁴

Adapun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, persyaratan bagi calon mempelai, sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat (1) yaitu: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dan pada ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”
- b. Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun. Sedangkan ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mempelai.”⁵⁵

2. Syarat-syarat wali nikah

Wali harus memenuhi syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Telah dewasa
- b. Laki-laki
- c. Berakal sehat
- d. Muslim
- e. Tidak dipaksa
- f. Adil
- g. Tidak sedang melakukan ihram haji dan umrah.⁵⁶

⁵⁴ *Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Permata Press, 2013), *op. cit.*, hlm. 40-41.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 79-80.

⁵⁶ Abd Kadir Syukur, *op. cit.*, hlm. 47-48.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masalah wali nikah yang disebutkan pada Pasal 19 s/d Pasal 23, yaitu sebagai berikut:

Wali nikah yang diatur Pasal 19 adalah: “Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Selanjutnya Pasal 20 ayat (1), ialah:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Sedangkan Pasal 21 ini menjelaskan mengenai pengelompokan wali:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam suatu kelompok sama derajatnya kekerabatan makayang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁵⁷

⁵⁷ *Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Permata Press, 2013), *op. cit.*, hlm. 7.

3. Syarat dua orang saksi

Syarat-syarat saksi yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah saksi minimal dua orang
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Beragama Islam
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Tidak dipaksa
- g. Tidak sedang melaksanakan ihram
- h. Memahami apa yang digunakan untuk ijab dan Kabul⁵⁸

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيِّ مُرْشِدٍ.

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi yang adil dan seorang wali yang cerdas.”⁵⁹

Sedangkan ketentuan saksi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 s/d Pasal 26, yaitu:

- a. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- b. Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli.
- c. Saksi harus hadir dan menyaksisikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

⁵⁹ Al-Faqih Abu Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 430.

4. Syarat Ijab Kabul

Adapun syarat ijab Kabul, sebagai berikut:

Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tajwiz* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.⁶¹
- d. Antara ijab dan kabul diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
- e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya dan harus terus terang.⁶²
- f. Orang yang terikat ijab dan kabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.⁶³

Sedangkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang akad nikah (ijab kabul) adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Mardani, *op. cit.*, hlm. 46.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Abd Kadir Syukur, *op. cit.*, hlm. 49.

⁶³ Mardani, *op. cit.*, hlm. 46.

1. Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
2. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Dan wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.
3. Yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai laki-laki secara pribadi.⁶⁴

Pada Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjalskan mengenai masalah diperbolehkannya ijad dan kabul diwakilkan kepada orang lain, yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam hal tertentu ucapan ijab dan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Sedangkan pada ayat (3) bunyi: “Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.”⁶⁵

Hadits Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُؤْفَى بِهِ
مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ⁶⁶

“Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, ia mengatakan, “Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 46-47.

⁶⁵ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Permata Press, 2013), *op. cit.*, hlm. 9.

⁶⁶ Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 568.

sesuatu yang karenanya kehormatan menjadi halal bagimu.” (Muslim IV: 140).⁶⁷

D. Pengertian Nikah di Bawah Umur dan Dispensasi Nikah

1. Pengertian Nikah di Bawah Umur

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum baligh, serta belum siap dan matang untuk melakukan pernikahan dan menjalani kehidupan berumah tangga.⁶⁸

Pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pernikahan harus dipersiapkan dengan matang, baik itu dari segi mental, ekonomi, dan sebagainya.⁶⁹

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) bahwa: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁷⁰

Jadi, Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus. Jadi, dispensasi nikah merupakan bentuk keringanan bagi calon mempelai yang umurnya belum mencapai batas dibolehkan untuk

⁶⁷ Syaikh Muhammad Nasruddin al-Albani, *Mukhtasar Şahih Muslim (Ringkasan Şahih Muslim*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010), hlm. 509.

⁶⁸ www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini. Diakses 23 April 2018, pukul. 22.00 wita.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Permata Press, 2013), *Op. cit.*, hlm. 80.

menikah. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

2. Batas Umur Perkawinan

Mengenai masalah perkawinan di bawah umur Islam dalam nash al-Qur’an dan as-Sunnah tidak memberikan batasan yang jelas terkait minimal umur seseorang untuk bisa melaksanakan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu jelas tentang batas umur baligh. Secara umum Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang jelas dan tegas manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur.⁷¹ Akan tetapi Imam Syafi’i yang merupakan pelopor mazhab yang diikuti al-Ghazali, dalam hal ini (batas umur dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan yaitu 15 tahun⁷² atau bisa juga ditandai dengan tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang.⁷³

Sedangkan dalam hukum positif yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menerangkan mengenai masalah

⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera), 2001, hlm. 317-318.

⁷² *Ibid.*, hlm. 317.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 317.

batasan umur itu pada Pasal 7 ayat (1), ialah: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.”⁷⁴

Di samping itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan, itu mengakibatkan lajunya kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu, maka Undang-undang menentukan batas umur untuk kawin bagi laki-laki dan perempuan.⁷⁵

3. Sebab-sebab terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Di beberapa daerah yang ada di Indonesia, pernikahan dini masih sering terjadi. Secara umum, penyebab utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Keinginan untuk segera mendapat keturunan atau ingin menambah anggota keluarga
- b. Tidak adanya pengetahuan terhadap akibat buruk perkawinan yang umurnya terlalu muda, baik bagi mempelai maupun keturunannya⁷⁶

Sementara itu, secara rinci faktor penyebab perkawinan di usia muda terjadi karena:

⁷⁴ *Undang-undang* Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 80.

⁷⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.), hlm. 76.

⁷⁶ <http://genbagus.blogspot.com/2014/05faktor-penyebab-pernikahan-dini.html?m=1>. Kamis, 26 April 2018, pkl 22.00 wita.

a. Masalah ekonomi keluarga

Biasanya ini terjadi karena perempuan tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu.

b. Masalah pendidikan anak

Karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat, itu membuat pernikahan dini semakin pesat.

c. Masalah orang tua

Karena khawatir anaknya membuat aib bagi keluarga atau karena takut anaknya berbuat zina pada saat berpacaran.

d. Masalah media social dan internet

Pada zaman sekarang anak-anak sangat mudah mengakses segala sesuatu yang bersifat negatif, hal ini membuat mereka terbiasa dengan hal-hal negatif tersebut.

e. Masalah hamil di luar nikah

f. Faktor adat, tetapi faktor ini sudah jarang sekali muncul.⁷⁷

E. Manfaat dan Hikmah Nikah Muda

Sebenarnya nikah muda ini punya dampak positif juga selain bernilai ibadah, bahwa nikah juga bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Nikah muda solusi untuk membendung zina
2. Terjaga dari perbuatan haram

⁷⁷ *Ibid.*

3. Menenangkan batin
4. Berdampak positif kepada anak
5. Ada teman berbagi ketika kesulitan⁷⁸

F. Resiko dan Dampak Nikah Muda

Sedangkan dampak negatif nikah muda tentunya juga ada, memang sedikit sekali artikel dakwah yang mengungkapkan hal ini dengan dalih khawatir banyak yang tidak mau menikah muda karena takut efek negatifnya. Adapun dampak negatif dari nikah muda sebagai berikut:

1. Pernikahan terlalu dini akan membahayakan kesehatan reproduksi perempuan
2. Kurangnya kedewasaan dalam mengasuh anak
3. Rentan perceraian
4. Pernikahan terlalu dini juga akan mengurangi masa kebebasan
5. Merepotkan orang tua⁷⁹
6. Merasa *shock* ketika pertama kali melahirkan karena rasa sakit yang luar biasa.⁸⁰

⁷⁸<http://ashabul-muslimin.blogspot.com/2016/11/hikmah-dan-resiko-nikah-muda-dalam.html?m=1>, Minggu, 22 april 2018, pkl. 10.55 wita.

⁷⁹<http://ashabul-muslimin.blogspot.com/2016/11/hikmah-dan-resiko-nikah-muda-dalam.html?m=1>, Minggu, 22 april 2018, pkl. 10.55 wita.

⁸⁰ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Cet. I, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm. 418.

Kehamilan di usia remaja juga membawa resiko yang tidak kecil, baik dari sisi medis maupun psikologis. Masalah kehamilan remaja, secara biologis maupun social mempunyai dampak yang tidak baik pada si ibu maupun si anak, yaitu ibu yang hamil saat remaja cenderung mengalami anemia (kurang darah) berat. Selain itu, kalau dia melahirkan, kemungkinan terjadi pendarahan yang lebih besar. Begitu juga dengan anak yang dilahirkan, ada kemungkinan lahir prematur atau memiliki berat lebih rendah.⁸¹

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawina, dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan anak-anak di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa umur yang lebih rendah bagi perempuan untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.⁸²

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, 2001, hlm. 51.